**UPAYA PENINGKATAN KEMAMPUAN APARATUR DESA DALAM**

**PELAKSANAAN TUGAS ADMINISTRASI DI DESA LINGGANG AMER**

**KECAMATAN LINGGANG BIGUNG KABUPATEN KUTAI BARAT**

**Nama : Kornelius**

**NPM : 15.11.1001.3509.035**

**ABSTRAK**

 **KORNELIUS**, Thesis Title **Efforts to Increase the Capability of Village Apparatus in the Implementation of Administrative Tasks in Linggang Amer Village, Linggang Bigung Sub-District, West Kutai Regency**, Advisor I Mrs. Dra. H. Nanik Pujiastuti, M.Si and Ms. Raudah Mahmud, S.Ag, M.HI as II supervisors.

The purpose of this paper is: 1. To find out about efforts to improve the ability of village officials in carrying out administrative tasks in Linggang Amer Village, Linggang Bigung Sub-District, West Kutai Regency. 2. To find out the inhibiting and supporting factors in carrying out government administrative duties in the village of Linggang Amer, Linggang Bigung District, West Kutai Regency.

The results showed that the implementation of government duties in Linggang Amer Village, Linggang Bigung Subdistrict, West Kutai Regency in the process of administrative services to the community tended to be less than optimal, and would continue to be an evaluation of village government so that the services provided could be maximized.

Efforts to Increase the Capacity of the Linggang Amer Village Apparatus in carrying out the administration in Linggang Amer Village, Linggang Bigung District, West Kutai Regency; 1. Development of apparatus discipline. 2. Education and training. Giving Work Motivation. Supporting factors and inhibiting factors, supporting factors in the form of hardware and software. While the inhibiting factor is the ability to measure knowing the skills of each apparatus, as well as difficulties in the operation of the application of village funds financial statements.

**Keywords : Village Apratur Ability, Implementation of Government Administration Tasks**

**I.PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang**

 Keberadaan aparat desa yang juga diberikan tugas dibidang administrasi mempunyai peran yang sangat penting karena sebagai organ pemerintahan yang paling bawah mengetahui secara pasti segala kondisi dan permasalahan yang ada diwilayahnya, maka input pada pemerintah kecamatan yang menyangkut berbagai keterangan dan informasi sangatlah dibutuhkan dalam pengambilan kebijaksanaan daerah maupun nasional untuk kebutuhan pembangunan secara menyeluruh.

 Di era globalisasi dewasa ini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sudah sangat maju , hal ini terlihat dari kemajuan transportasi dan alat teknologi komunikasi dibeberapa negara di dunia ini. Perkembangan tersebut tentu akan mambuat persaingan disegala bidang yang semakin menuntut kemampuan SDM untuk mampu mengelola itu semua, kecanggihan alat-alat teknologi yang diimbangi dengan mutu kualitas sumber daya manusia yang cukup memadai, maka tingkat produktivitas kerja tentu akan semakin meningkat pula.

 Indonesia sebagai negara sedang berkembang masih belum siapuntuk menghadapi persaingan global tersebut, terutama dalam hal mutu sumber daya manusianya yang masih belum optimal sehingga menuntut kepada instansi/lembaga yang bersangkutan untuk lebih memperhatikan kualitas dari SDM ini dimasa mendatang. Tuntutan ini merupakan beban yang sangat berat, apalagi dimasa keadaan sekarang dimana Indonesia dalam keadaan yang masih berkembang, akan tetapi hal itu tidak menjadi pengahlang bagi bangsa ini ikut bersaing .

 Agar desa mampu menggerakkan, mengatur, mengendalikan dan mendorong masyarakat untuk memajukan desa dengan segala pembangunannya dibutuhkan aparatur desa yang mempunyai kemampuan yang baik dalam beberapa hal untuk memenuhi tuntutan perkembangan zaman, agar terjadinya profesioanlisme kerja aparatur desa. Selain itu juga aparatur desa juga harus produktif, proaktif, berwibawa, kreatif, transparan, inovatif, serta juga mempunyai visi. Selain melaksnakan tugas –tugas umum pemerintahan desa juga melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh pemrintahan diatasnya untuk menangani sebagian urusan otonomidaerah. yang meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan penyelenggaran, kewenangan lain yang dilimpahkan, pelimpahan sebagian wewenang ini berdasarkan criteria eksternalitas dan efesiensi.

 Terjadinya transisi pemerintahan yang berkali-kali menyebabkan terjadinya perubahan sistem dan struktur pemerintah baik dipusat dan di daerah. Untuk menghadapi perubahan tersebut pemerintah daerah berkewajiban meningkatkan kemampuan aparatur pemerintah diberbagai bidang.Seperti peningakatan pada suumberdaya manusianya, skills knowledge, dan ability dengan melalui pendididkan, pelatihan, kursus, magang, seminar/diskusi, dan lain sebagainya yang bisa meningkatkan kemampuan aparatur.

 Pada tata kelola pemerintahan di Indonesia wilayah desa merupakan titik penegelolaan terbawah dalam hal tata kelola pemerintahan, tak heran jika desa ,menjadi sasaran penyelenggaraan aktifitas pemerintahan dan pembangunan, karena pemnbagunan dari desa merupakan perwujudan dari keseriusan pemerintah dalam hal membangun. Mengingat sangat kompleksnya aspek-aspek atau bidang yang hendak dibangun ditingkat desa, maka salah satu aspek yang harus diperhatikan terlebih dahulu adalah peningkatan kemampuan aparatur desa itu sendiri dalam tugas-tugas administrasi pemerintahan, disamping itu memperkuat partisipasi masyarakat dan kelembagaannya serta aspek lainnya. Sejak kebijakan otonomi daerah diberlakukan, terjadi perubahan yang mendasar dalam sistem dan struktur pemerintahan daerah. Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah yang diganti dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 serta diperbaharui dengan Undang – Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah membawa dampak yang sangat luas bagi penyelenggaraan pemerintahan, perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan dan sistem penganggaran dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan di daerah khususnya pada tingkat pemerintahan desa. Kebijakan otonomi daerah tersebut bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia.

 Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur, yang pada hakekatnya adalah pembangunan manusia seutuhnya dan masyarakat pada umumnya. Untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut, pemerintah telah mencanangkan pembangunan yang tersebar di seluruh pelosok tanah air melalui tahap-tahap yang telah ditetapkan yaitu lima tahun.

 Untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang telah diprogramkan, perlu didukung oleh aparatur pelaksana yang mampu dan terjalinnya hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Menurut Undang - Undang Dasar 1945, sistem pemerintahan Indonesia dinyatakan bahwa daerah di Indonesia akan dibagi dalam daerah provinsi. Daerah provinsi dibagi dalam daerah kabupaten/kota. Undang Undang mengatur daerah-daerah yang bersifat otonom atau bersifat daerah administrasi belaka, menurut aturan yang akan ditetapkan Badan Perwakilan Daerah (BPD). Maka di daerah pemerintahan akan bersendi atas dasar permusyawaratan Thamrin (2006:01). Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 maka kebijakan politik hukum yang ditempuh oleh pemerintah terhadap pemeritahan daerah yang dapat mengatur dan mengurus urusan pemerintah, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan daya saing daerah dengan mempertimbangkan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) (Sunarno Siswanto) (2008:2).

 Administrasi pemerintah memegang peranan yang penting karena keterlibatan pemerintah yang besar pada proses pembangunan dalam sistem administrasi. Untuk itu agar tujuan pembangunan benar-benar dapat tercapai seperti yang diharapkan, maka yang harus diperhatikan adalah adanya aparat pemerintah yang memiliki kualitas yang memadai. Kualitas tersebut selain dilandasi kemampuan dan keterampilan yang memadai juga harus disertai disiplin yang tinggi, sehingga dalam merealisasikan tujuan-tujuan nasional sesuai dengan kebijaksanaan pembangunan yang ditetapkan pemerintah, dengan titik berat pembangunan perlu diarahkan pada masyarakat pedesaan karena sebagian besar penduduk Indonesia bertempat tinggal di pedesaan. Kebijaksanaan pembangunan bagi seluruh lapisan masyarakat merupakan sasaran utama berdasarkan landasan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan demi mencapai tujuan sehingga masyarakat desa dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Pada kenyataannya tujuan pembangunan dapat tercapai apabila dimulai dari jajaran terendah yaitu pembangunan di tingkat desa (Sunarno Siswanto) (2008: 8). Hakekat pembangunan desa bertujuan untuk memperbaiki kondisi dan taraf hidup masyarakat. Di samping itu pemerintah desa merupakan suatu strategi pembangunan yang memungkinkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dinikmati oleh rakyatnya dan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan tercapainya stabilitas keamanan wilayah yang sehat dan dinamis. Pemerintah desa sebagai alat untuk mencapai tujuan administrasi negara, berfungsi sebagai tangan panjang pemerintah dalam rangka pembangunan nasional demi tercapainya kesejahteraan rakyat yang merata di seluruh tanah air. Oleh karena itu diperlukan aparatur pelaksana yang mampu memahami, mengkaji dan menelaah serta menyelesaikan permasalahan yang timbul, sebagai konsekuensi logis dari pada usaha penyempurnaan aparatur pemerintahan maka akan dapat menambah kemampuan aparatur pemerintah kan fungsi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Tingkat kemampuan dan keterampilan aparat desa belum memenuhi keinginan yang diharapkan sesuai dengan tingkat perkembangan pembangunan, pengaturan dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Sesuai dengan sifat NKRI makan kedudukan desa diseragamkan dan mengidahkan keragaman keadaaan desa dan adat istiadat yang masih berlaku dengan memperhatikan hal tersebut maka desa tidak kehilangan ciri khas desa. Desa diarahkan pada usaha memperkuat kedudukan pemerintahannya agar mampu menggerakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunana serta mampu menyelenggarakan penyelenggaraan administrasi dengan baik agar desa yang dipimpin dapat berkembang dengan baik.

 Untuk menyelenggarakan administrasi desa yang efektif diperlukan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan terhadap aparatur pemerintah desa dalam bidang pemerintahan, sehingga perangkat desa dapat melakukan tugas dan kewajibannya dengan baik dalam melayani masyarakat. Hal tersebut diatur dalam Pasal 6 ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa, yang menjelaskan tentang berbagai jenis pembinaan dan pengawasan. Pembinaan administrasi desa yang dijalankan adalah untuk mengembangkan sistem administrasi pemerintahan desa yang berfungsi sebagai sumber data dan informasi bagi seluruh aktifitas pemerintahan dalam pembangunan secara nasional. Untuk meningkatkan manajemen pemerintahan desa perlu dilakukan penataan administrasi agar lebih efektif dan efisien, penataan administrasi merupakan pencatatan data dan informasi dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa maka dilakukan penyempurnaan terhadap pelaksanaan administrasi. Oleh karena itu pemerintah kecamatan sangat dituntut untuk turut berperan aktif dalam usaha pembinaan dan pengawasan administrasi yang dilakukan untuk aparatur pemerintah desa, sehingga akan terwujud pelaksanaan administrasi yang tertib dan dapat mendorong pelaksanaan pemerintahan di wilayah pedesaan.

 Agar desa mampu menggerakkan, mengatur, mengendalikan dan mendorong masyarakat untuk memajukan desa dengan pembangunannya dibutuhkan seorang kepala desa dan perangkat desa yang berhasil guna dan berdaya guna, profesional. Selain itu perangkat desa juga harus bersih, produktif, berwibawa, kreatif, transparan, inovatif, peka, antisipasif dan proaktif, serta juga mempunyai visi Sondang P. Siagian (2008: 159-163). Selain melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan desa juga melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh pemerintahan diatasnya untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek Perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan, kewenangan lain yang dilimpahkan. Pelimpahan sebagian wewenang ini dilakukan berdasarkan kriteria eksternalitas dan efisiensi.

 Eksternalitas yang dimaksud adalah kriteria pelimpahan urusan pemerintahan dengan memperhatikan dampak yang timbul sebagai akibat dari penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Apabila dampak yang ditimbulkan bersifat internal desa, maka urusan pemerintahan tersebut menjadi kewenangan kepala desa. Sedangkan yang dimaksud dengan efisiensi adalah kriteria pelimpahan urusan pemerintahan dengan memperhatikan daya guna tertinggi yang dapat diperoleh dari penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan dilingkup desa. Apabila urusan pemerintahan lebih berdayaguna ditangani oleh desa, maka urusan tersebut menjadi kewenangan kepala desa. Sukses tidaknya pemerintahan desa sangat tergantung dengan administrasi desa. Administrasi desa dapat berjalan dengan baik apabila kualitas manusia sebagai sumber daya insani dapat melaksanakan dengan sebaik mungkin artinya administrasi desa sangat menentukan kedudukan pemerintahan desa. Administrasi desa merupakan tolak ukur keberhasilan pemerintahan desa karena merupakan fondasi dalam memperkuat dan mengembangkan pemerintahan desa. Jadi administrasi desa merupakan prioritas utama yang harus mendapat perhatian serius oleh pemerintah khususnya pemerintah kecamatan. Salah satu desa yang berusaha untuk meningkatkan kemampuan yang dimiliki oleh perangkat desa dalam pelaksanaan administrasi desa adalah Desa Linggang Amer Kecamatan Linggang Bigung Kabupaten Kutai Barat.

 Desa Linggang Amer melakukan pembinaan dan pengawasan dalam bidang administrasi desa yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan perangkat desa, mendisiplinkan perangkat desa dalam menjalankan pemerintahan desa. Berdasarkan latar belakang dari permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk mengetahui lebih mendalam mengenai permasalahan yang sebenarnya tentang peningkatan sumber daya manusia dalam hal ini adalah aparatur desa dalam pelaksanaan tugas administrasi desa . Sehingga dalam penelitian ini, judul yang diambil oleh peneliti adalah : “Upaya Peningkatan Kemampuan Aparatur Desa dalam Pelaksanaan Tugas Administrasi di desa Linggang Amer Kecamatan Linggang Bigung Kabupaten Kutai Barat”

**1.2. Rumusan Masalah**

 Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah upaya peningkatan kemampuan aparatur desa dalam pelaksanaan tugas administrasi di Desa Linggang Amer Kecamatan Linggang Bigung Kabupaten Kutai Barat ?

2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi upaya peningkatan kemampuan pemerintah desa dalam pelaksanaan tugas administrasi pemerintahan di Desa Linggang Amer Kecamatan Linggang Bigung Kabupaten Kutai Barat

**II.KERANGKA DASAR TEORI**

**2.1.1 Kepala Desa**

Kepala desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ). Masa jabatan kepala desa adalah 6 tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan. Kepala desa juga memiliki wewenang menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD.

 Kepala desa dipilih langsung melalui pemilihan kepala desa (Pilkades) oleh penduduk desa setempat, syarat-syarat menjadi calon kepala desa mengikuti peraturan pemerintah No 6 Tahun 2014,perangkat desa bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Perangkat desa ini terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya, salah satu perangkat desa adalah sekretaris desa, yang diisi dari pegawai negeri sipil. Sekretaris desa diangkat oleh sekretarisdaerah Kabupaten/Kota atas nama Bupati/Walikota perangkat desa lainnya diangkat oleh kepala desa dari penduduk desa. Yang ditetapkan dengan keputusan kepala desa. Perangkat desa juga mempunyai tugas untuk mengayomi kepentingan masyarakatnya. Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah. Anggota BPD terdiri dari ketua rukun warga, pemangku adat, golongan profesi , pemuka agama dan tokoh atau tokoh masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD 6 tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk satu kali jabatan berikutnya.

Pimpinan dan anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai kepala desa dan perangkat desa. BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspir asi masyarakat, penyelenggaraan urusan pemerintahan desa menjadi kewenangan desa didanai dari anggaran pendapatan belanja desa ( APB , bantuan pemerintah dan bantuan pemerintah daerah. penyelenggaraan urusan pemerintah desa didanai APBD, penyelenggaran urusan pemerintah daerah diselenggarakan oeleh pemerintah desa .

**2.1.4 Administrasi Desa**

Administrasi Desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada Buku Administrasi Desa. Jenis dan bentuk Administrasi Desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 yang lama, dan sekarang ada yang terbaru permendagri No 47 Tahun 2016 :

a. Administrasi Umum adalah kegiatan pencatatan data dan informasi

mengenai kegiatan Pemerintahan Desa pada Buku Administrasi Umum, terdiri dari:

1) Buku Data Peraturan Desa;

2) Buku Data Keputusan Kepala Desa;

3) Buku Data Inventaris Desa;

4) Buku Data Aparat Pemerintah Desa;

5) Buku Data Tanah Milik Desa/Tanah Kas Desa;

6) Buku Data Tanah di Desa;

7) Buku Agenda; dan

8) Buku Ekspedisi.

b. Administrasi Penduduk adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penduduk dan mutasi penduduk pada Buku Administrasi Penduduk, terdiri dari:

1) Buku Data Induk Penduduk Desa;

2) Buku Data Mutasi Penduduk Desa;

3) Buku Data Rekapitulasi Jumlah Penduduk Akhir Bulan;

4) Buku Data Penduduk Sementara.

c. Administrasi Keuangan adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai pengelolaan keuangan desa pada Buku Administrasi Keuangan, terdiri dari:

1) Buku Anggaran Penerimaan;

2) Buku Anggaran Pengeluaran Rutin;

3) Buku Anggaran Pengeluaran Pembangunan;

4) Buku Kas Umum;

5) Buku Kas Pembantu Penerimaan;

6) Buku Kas Pembantu Pengeluaran Rutin; dan

7) Buku Kas Pembantu Pengeluaran Pembangunan.

d. Administrasi Pembangunan adalah kegiatan pencatatan data dan informasi pembangunan yang akan, sedang, dan telah dilaksanakan pada Buku Administrasi Pembangunan, terdiri dari:

1) Buku Rencana Pembangunan;

2) Buku Kegiatan Pembangunan;

3) Buku Inventaris Proyek;

4) BukuKader-Kader Pembangunan/PemberdayaanMasyarkat

e. Administrasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau yang disebut dengan BPD adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai BPD, terdiri dari:

1) Buku Data Anggota BPD;

2) Buku Data Keputusan BPD;

3) Buku Data Kegiatan BPD;

4) Buku Agenda BPD; dan

5) Buku Ekspedisi BPD.

Rangkaian kegiatan yang digolongkan sebagai administrasi mencakup:

 (1)dilakukan oleh sekelompok orang

 (2 orang atau lebih)

 (2)berlangsung dalam suatu kerjasama

 (3)dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan.

 Ketiga faktor inilah yang merupakan tanda pengenal atau ciri khas dari administrasi yang apabila faktor-faktor tersebut disingkat adalah sekelompok orang, kerjasama, dan tujuan tertentu. Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa kerjasama adalah rangkaian perbuatan yang dilakukan bersama-sama secara teratur oleh lebih seorang yang menimbulkan akibat yang sebenarnya tidak akan terjadi apabila dilakukan oleh masing-masing seorang diri. Administrasi adalah proses penyelenggaraan kegiatan untuk mewujudkan rencana/keputusan yang telah dibuat agar menjadi kenyataan, dengan cara mengatur kerja dan mengarahkan orang-orang yang melaksanakannya.

**III.METODE PENELITIAN**

**3.1. Jenis Penelitian**

Penelitian merupakan suatu proses yang panjang, penelitian berawal dari minat yang ada dalam diri seseorang dalam memahami fenomena tertentu yang kemudian berkembang menjadi ide, teori, dan konsep. Untuk mewujudkan penelitian yang berawal dari minat tersebut dilakukanlah cara untuk mewujudkannya adalah dengan memilih metode yang cocok dengan tujuan suatu penelitian.

**3.2. Fokus Penelitian**

Menurut Moeleong (2009: 55) Fokus dasarnya adalah masalah yang bersumber dari pengalaman penelitian atau melalui pengetahuan yang bersumber dari pengalaman peneliti. Penentuan fokus penelitian memiliki dua tujuan yaitu :

1. Penentuan fokus membatasi studi yang berarti bahwa dengan adanya focus penentuan tempat menjadi layak.

2. Penentuan fokus secara efektif menetapkan kriteria inklusi-inklusi untuk menyaring informasi yang masuk. Mungkin data cukup menarik, tetapi jika dipandang tidak relevan maka data itu tidak dipakai (Moelong, 2009:27) Dalam penelitian ini yang menjadi fokus adalah strategi untuk meningkatkan kapasitas aparatur Desa Linggang Amer Kecamatan Linggang Bigung Kabupaten Kutai Barat dalam bidang pelayanan kepada masyarakat diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Ketrampilan dalam kedisiplinan administrasi pelayanan

2.Adanya pendidikan dan pelatihan dalam bidang administrasi

 Pada umumnya suatu penelitian dilakukan karena adanya masalah yang memerlukan pemecahan. Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan akan dapat memberikan gambaran mengenai faktor penyebab dan akibat yang ditimbulkan oleh masalah tersebut,serta bagaimana cara terbaik untuk mengatasi masalah yang dimaksud.

**3.3 Lokasi Penelitian**

 Lokasi penelitian pada penelitian ini yaitu di Desa Linggang Amer Kecamatan Linggang Bigung Kabupaten Kutai Barat. Penulis melakukan penelitian karena adanya masalah yang memerlukan pemecahan yaitu adanya faktor penghambat dan pendukung, tentang upayapeningkatan Kemampuan Aparatur Desa Dalam Pelaksanaan Tugas Administrasi di Desa Linggang Amer Kecamatan Linggang Bigung Kabupaten Kutai Barat.

**3.4. Informan Penelitian**

 Dalam penelitian ini pihak yang dijadikan informan adalah yang dianggap mempunyai informasi (*key-informan*) yang dibutuhkan di wilayah penelitian. Cara yang digunakan untuk menentukan informan kunci tersebut, maka penulis menggunakan *purposive sampling.* Tekning sampling yang digunakan peneliti ini adalah teknik yang digunakan ketika peneliti mempunyai pertimbangan – pertimbangan tertentu dalam pengambilan sampelnya Arikunto, (2009:128). Menurut peneliti, informan dalam penelitian ini adalah:

a.Kepala Desa Linggang Amer Kecamatan Linggang Bigung Kabupaten Kutai Barat

b. Ketua BPK Desa Linggang Amer

c. Sekretaris Desa Linggang Amer

d. Tiga Orang Kepala Urusan

- kepala urusan pemerintahan

- kepala urusan pembangunan

 - kepala urusan kemasyarakatan

**3.5. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dapat digunakan untuk mengumpulkan atau mendapatkan data dari fenomena empiris Silalahi, (2009:291). Kemudian menurut Rahman (2009:71), bahwa penelitian selain menggunakan metode yang tepat, juga perlu memilih teknik dan pengunpulan data yang relevan. Adapun beberapa teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti menggunakan beberapa teknik, yaitu:

a. Wawancara

 Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dengan responden Gulo, ( 2010:119 ). Komunikasi berlangsung dalam bentuk Tanya jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak dan mimic responden merupakan pola media yang melengkapi kata-kata secara verbal. Karena itu, wawancara tidak hanya menangkap ide , tetapi juga dapat menangkap perasaan, penga laman, emosi, motif, yang dimiliki oleh responden yang bersangkutan.

Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara kepada informan yang telah ditentukan dalam penentuan informan di atas, untuk mengetahui upaya – upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan aparatur Desa Linggang Amer Kecamatan Linggang Bigung Kabupaten Kutai Barat dalam melaksanakan Tugas Administrasi Desa.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal atau variabel yang berupa catatan, buku, surat kabar, notulen, rapat, agenda, dan sebagainya Arikunto, (2009:188). Data yang dikumpulkan dalam penelitian berasal buku-buku yang berisikan tentang teori yang berkaitan dengan upaya –upaya peningkatan kemampuan aparatur Desa Linggang Amer Kecamatan Linggang Bigung Kabupaten Kutai Barat dalam melaksanakan Tugas Administrasi Desa.

**3.6. Teknik Analisis Data**

 Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2012:7), teknik analisa data kualitatif meliputi tiga alur kegiatan sebagai sesuatu yang terjalin pada saat sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar untuk membangun suatu analisis, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa dengan menggunakan model interaktif (*interactive models of analysis*). Dalam model ini terdapat tiga komponen analisis, yaitu sebagai berikut :

1. Reduksi Data

2. Penyajian Data

**IV.HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Desa Linggang Amer terletak di Kecamatan Linggang Bigung Kabupaten Kutai Barat, desa Linggang Amer merupakan hasil dari pemecahan Linggang Bigung pada tahun 1915 kemudian pada tahun 1982 Kampung Linggang Amer menjadi kampung depenitif berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Kertanegara. Kampung Linggang Amer bagian integral dari kecamatan Linggang Bigung Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur dengan luas 3.225 HA. Kampung Linggang Amer Memiliki 7 Rukun Tetangga ( RT ) dengan jumlah Penduduk 1.865 Jiwa.

**4.2 Hasil Penelitian**

 Dalam penyajian data, peneliti berusaha untuk memberikan informasi tentang hasil penelitian yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan, baik itu wawancara maupun dokumentasi. Berikut adalah data informan yang memberikan informasi dalam penelitian ini.

 Seperti yang telah disampaikan dan diuraikan sebelumnya, bahwa tugas dan fungsi pemerintah demikian luas dan kompleks ( adminitrasi dalam arti luas ) yaitu meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat. Hal ini berate tugas perangkat desa juga demikian adanya, karena perangkat desa adalah salah satu unsur pemerintah, oleh karena itu untuk kepentingan kajian ini dibatasi pada pelaksanaan tugas pernagkat desa dalam arti sempit ( ketatausahaan ) yang meliputi : surat menyurat, dan penyimpanannya ( kearsipan )

Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa pemerintahan meencakup pelaksanaan atau penyelenggaraan pemerintahan desa, pemberdayaan masyarakat, pelayanan serta pembinaan masyarakat desa dan menjaga kententraman serta ketertiban umum, dan yang terakhir adalah pembangunan yang mencakup pemeliharaan sarana dan prasarana umum.

**4.2.1 Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah Desa.**

 Dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah desa dibutuhkan suatu pelayanan yang baik dan sesuai dengan keinginan masyarakat, dalam hal ini tentu respon dari aparatur desa harus cepat agar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat diberikan lebih maksimal.

**“ seperti yang disampaikan oleh Bpk. Suhardi sebagai berikut : setiap pelayanan yang diberikan kepada masyarakat merupakan tugas utama aparatur desa Linggang Amer, agar masyarakat betul-betul merasa dilayani dengan baik oleh aparatur desa, dan itu adalah amanah sebagai aparatur desa” ( Wawancara pada tanggal 11 Juni 2019)**

 Berdasarkan pernyataan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa dalam hal pelayanan kepada masyarakat, aparatur desa Linggang Amer sangat sigap dalam merespon setiap masyarakat yang datang ke kantor desa . meskipun memang terkadang pasti ada beberapa kendala teknis yang kadang menajadi penghambat tapi itu bisa diatasi .

**4.2.2 Pembinaan Disiplin Aparatur Desa**

 Adapun bentuk penerapan disiplin aparatur desa Linggang Amer Kecamatan Linggang Bigung Kabupaten Kutai Barat adalah pembinaan disi[lin waktu kerja, sebab dengan ketepatan jam masuk kerja sangat erat kaitannya dengan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Menurut pengamatan peneliti bahwa penerapan disiplin waktu kerja pada dasarnya belum dilaksanakan dengan baik hal ini dikarenakan menyesuaikan dengan kegiatan aparatur desa yang juga mempunyai pekerjaan sampingan sebagai petani karet oleh karena itu ada beberapa toleransi kepada aparatur yang memang mempunyai pekerjaan sampingan sebagai petani karet.

 Pelanggaran disiplin waktu kerja memang memang terjadi akan tetapi hal ini juga masih bisa ditoleransi karena beberpa pertimbangan dan kebijakan yang diambil oleh pimpinan desa dalam hal ini kepala desa, akan tetapi jika menurut aturan memang jam kerja harus tetap diikuti sperti seharusnya, namun karena memang sudah sudah menjadi budaya yang dari dulu dan juga masih bisa disesuaikan dengan kondisi didesa jadi hal ini tidak begitu menggangu pelayanan kepada masyarakat, disiplin yang dimaksudkan ditinjau dari ketepatan dan kebutuhan setiap apatatur terhadap waktu yeng telah ditentukan **( Bapak Suhardi, wawancara 11 Juni 2019 ).**

 Dari bebrapa uraian sebelumnya menunjukan bahwa umumnya aparatur pemerintah desa Linggang Amer kurang efektif dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya atau dengan kata lain hal ini akan berpengaruh negatif dan menghambat kemampuan terhadap pelaksanaan tugas-tugas adminitrasi .

 Hal ini menunjukan bahwa kebutuhan akan pembinaan disiplin kerja aparatur desa dibutuhkan agar peningkatan efektifitas dan efesiensi kerja aparatur dalam hal pelayanan masyarakat dapat meningkat, disini peran kepala desa yang paling menonjol dalam adminitrasi adalh pemberdayaan aparat desa diarahkan meningkatkan prestasi kerja aparatur yang professional pada bidangnya.

**4.2.3 Pendidikan Dan Pelatihan**

 Pendidikan dan pelatihan adalah merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan intelektual dengan kepribadian manusia. Pendidikan yang dilakukan dalam suatu proses pengembangan kemapuan bertujuan kearahyang diinginkan oleh organisasi yang bersangkutan. Sedangkan pelatihan adalah merupakan bagian dari proses pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan atau keterampilan khusus seseorang.

**“Pendidikan dan pelatihan yang diikuti oleh aparat Desa Linggang Amer diharapkan nantinya mampu melakukan tugasnya sebagai aparatur desa yang profesional dan responsive”. ( Suhardi, wawancara pada tanggal 11 Juni 2019 ).**

Pendidikan dan pelatihan dapat dianggap sebagai salah satu jalur untuk meningkatkan kemampuan aparatur desa usaha melayani kepentingan masyaraka, pentingnya program pendidikan dan pelatihan adalah bertujuan untuk;

 a.Untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola kegitan-kegiatan sesuai bidangnya.

b.Untuk meningkatkan pengetahuan mereka.

**4.3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi**

**Upaya Peningkatan Kemampuan Aparatur Desa.**

 Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi upaya peningkatan kemampuan aparatur desa dalam melaksanakan tugas sebagai pelayan masyarakat dan disesuaikan dengan UU tentang desa No 6 Tahun 2014 dan PP tentang desa No 43 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa pemerintahan mencakup pelaksanaan atau penyelenggaraan pemerintahan desa, pelayanan serta pembinaan masyarakat desa dan menjaga ketentraman serta ketertiban umum, dan terakhir adalah pembangunan yang mencakup pemeliharaan sarana dan prasaranana umum.

**4.3.1 Pendikan dan Kesehatan**

Faktor tingkat pendidikan dapat dikatakan sangat mempengaruhi dalam upaya peningkatan kemampuan aparatur desa, oleh karena generasi penerus dari desa adalh pemuda desa maka hal ini belum begitu terlaksana, karena kebanyakan para pemuda lebih memilih langsung bekerja setelah lulus dari bangku sekolah dibandingkan melanjutkan pendidikan ketingkat perguruan tinggi, maka karena itulah dalam misinya kampung Linggang Amer ingin meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memberikan motivasi masyarakat agar terus meningkatkan pendidikan.

 Dan untuk kesehatan hal ini juga tentu berpengaruh terhadap upaya peningkatan kemampuan aparatur desa, karena kondisi kesehatan yang prima adalah modal yang pasti harus dimiliki setiap pribadi untuk bisaterus berkegiatan. Untuk generasi penerus kampung dalam hal ini tentu tujuannya adalahpara pemuda kampung selalu dihimbau agar tidak mengkonsumsi minuman keras, menggunakan narkoba, dan lain-lain, hal tersebut tentu merusak generasi penerus kampung, dan kondisi ini sangat berpengaruh terhadap upaya peningkatan kemampuan aparatur desa.

**4.3.2. Sosial Budaya dan Olahraga**

 Di Desa Linggang Amer keadaan sosial masyarakatnya sangatlah baik, hal ini karena suasana di pedesaan memang demikian adanya , dan masyarakatnya mempunyai budaya yang sangat baik dalam hal pengambilan keputusan, seperti dengan musyawarah, jika ada hajatan atau acara duka , setiap masyarakat pasti datang untuk ikut dalam semua proses yang biasa dinamakan sempekat sempawat dalam bahasa indonesianya saling tolong menolong. Dan masyarakatnya juga mempunyai keyakinan agama masing-masing sesuai keyakinan yang dianut masing-masing dan tetap menjaga sikap toleransi disamping itu juga ada budaya nenek moyang yang masih dilestarikan hingga saat ini masihterus dilakukan. Meskipun dengan kebudayaan yang masih kental dan keadaan sosial yang masih begitu terasa erat, masyarakat disana sangat mementingkan sikap toleransi saling menghargai satu dengan yang lainnya sehingga sampai saat ini tidak ada gesekan antar masyarakat yang berkaitan dengan keyakinan masing-masing.

**4.3.3. Komunikasi dan Informasi**

 Untuk fasilitas komunikasi, di desa Linggang Amer termasuk baik karena untuk jaringan komunikasi seluler, internet masih bisa dinikmati didesa ini. Dilihat dari kemajuan dunia teknologi sekarang ini masyarakat disana bisa mengikutinya secara perlahanagar tidak terlalu ketinggala, meskipun memang belum secara merata untuk dikalangan masyarakat bisa menimatinya , karena tidak semua masyarakat mempunyai telepon yang bisa mengakses internet, tetapi hal ini dianggap wajar karena masyarakat pedesaan yang belum begitu tertarik akan hal tersebut.

**V.PENUTUP**

**5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan analisis dan pembahasan sebelumnya, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan demikian, proses pembangunan desa Linggang Amer Kecamatan Linggang Bigung Kabupaten Kutai Barat sudah dilaksanakan dengan baik meskipun memang ada bebrapa hal yang harus dievaluasi lagi dan perlu dioptimalkan melalui upaya-upaya yang maksimal, melalui pengembangan sumber daya manusia yang handal, pembangunan infrastruktur pedesaan serta pemanfaatan sektor lainnya untuk pembangunan desa, sumber daya alam hasil hutan, sarang burung wallet, yang dimiliki desa Linggang Amer merupakan modal besar untuk pembangunan desa dan meningk atkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun ada bebrapa hambatan dan tantangan seperti infrastruktur yang masih belum maksimal dibangun, serta kurangnya penguasaan teknologi .

 Dengan memperhatikan hasil penelitian pada Bab IV, maka penulis menyimpulkan bahwa upaya peningkatan kemampuan aparatur desa Linggang Amer Kecamatan Linggang Bigung Kabupaten Kutai Barat dilakukan dengan dua cara yaitu peningkatan disiplin kerja aparatur serta melakukan pendidikan dan pelatihan. Adapun penerapan disiplin waktu kerja, sebab dengan ketepatan waktu kerja pada jam masuk kantor sangat erat kaitannya dengan kualitas pelayanan yang diberikan. Pendidikan yang dilakukan dalam suatu proses pengembangan kemampuan aparatur desa bertujuan kearah yang diinginkan organisasi desa yang bersangkutan. Sedangkan pelatihan merupakan bagian dari proses pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan atau keterampilan khusus. Berdasarkan hasil penelitian penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Adapun upaya peningkatan kemampuan aparatur pemrintah desa dalam pelaksanaan tugas adminitrasi.

 **a**. Pembinaan disiplin aparat dimana kedisplinan sangat diperlukan agar terlaksana tugas pelayanan adminitrasi yang lebih efektif dan efisien.

 **b**. Pendidikan dan pelatihan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan yang dimiliki aparatur, baik itu kemampuan teknis, kemampuan teori,kemampuan konseptual, serta menigkatkan moral aparatur sesuai dengan kebutuhan pekerjaan melalui pelatihan dan pendidikan yang ada.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi upaya peningkatan kemampuan aparatur desa dalam melaksanakan tugas administrasi.

 a. Pendidikan dan kesehatan

 b. Sosial Budaya dan Olahraga

 c. Komunikasi dan Informasi

 faktor penghambat :

 a.Kemampuanmengukur keterampilan dan keahlian aparatur.

 b. Disiplin rendah.

 Faktor pendukung :

 a. Perangkat lunak

 b. Perangkat Kersa

**5.2 Saran**

Berdasarkan bebrapa uraian pada kesimpulan diatas penulis akan mencoba untuk memberikan saran-saran, sebagai berikut :

1. Pembinaan disiplin pegawai yang dimaksud adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan juga efisiensi efektifitas dalam pelayanan tugas kantor . tetapi hal ini sepenuhnya dilakukan oleh aparatur desa sehingga kedepannya, kepala desa akan terus melakukan pengawasan tehadap kedisiplinan aparatur.

2. Selain itu pihak desa juga diharapkan terus meningkatkan upaya yang ada seperti pelatihan dan pendidikan untuk peningkatan kemampuan aparatur desa Linggang Amer Kecamatan Linggang Bigung Kabupaten Kutai Barat.

3. Peran aktif dari masyarakat juga diharapkan terus diakomodir agar pemerintah desa merasa diawasi, karena peran aktof masyarakat sangat membantu untuk menumbuhkan kebersamaan sehingga hal ini diharapkan bisa mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.

 Dinamika dalam pembangunan senantiasa membawa aspirasi dan tuntutan yang baru dari masyarakat untuk mewujudkan kualitas hidup yang lebih baik, aspirasi dan tuntutan itu dilandasi oleh hasrat untuk ikut berperan dalam pembangunan, khususnya didesa ,demi mewujudkan masyarakat yang maju, mandiri, sejahtera adil dan makmur.

**DAFTAR PUSTAKA**

Arikunto, S*.* 2009*. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Edisi Revisi 6*. Jakarta : Rineka Cipta.

Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan. 2012. *Analisis Kemampuan* *Kerja Aparat Kecamatan Dalam Memberikan Pelayanan Administrasi* *Kepada Masyarakat.*

Cece*,* Wijaya. 2011, *Kemampuan Dasar Guru Dalam Proses Belajar. Mengajar.* Bandung: PT Remaja Rosda Karya.

Gulo, 2010 Metodologi Penelitian . Jakarta : Grasindo

Handoko, H. 2006. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia.*

Yogyakarta: BFFE.

Hasibuan, Malayu. 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia,* cetakan kesembilan. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Kansil, C. S. T. 1984. *Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah*. Jakarta: Bina Aksara.

Kartono, Kartini. 2012. *Pemimpin Dan Kepemimpinan: Apakah Kepemimpinan. Abnormal Itu? – Ed. 1, Cet, 18 -*. Jakarta: Rajawali Pers.

Moleong, Lexy J. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.

Mardalis, 2003, Metode Penelitian Kualitatif ( Suatu Pendekatan Proposal ), Jakarta: Bumi Aksara

Sugioyono. Prof. Dr, 2010 Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif ,Bndung CV. Alfa Beta

Silalahi, 2009 Metode Penelitian Sosial, Bandung: PT. Refika Aditama

Sunarno Siswanto. 2008. Hukum Pemerintahan Daerah Indonesia, Jakarta. Sinar Grafika

Umar, Husein 2009. Metode Riset Ilmu Adminitrasi . Jakarta Gramedia Pustaka Utama

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 Tentang Pedoman Administrasi Desa

Peraturan Pemerintah No.43 tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 6 Tahun 2014